



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI VII DPR RI  
DENGAN DIRJEN PPI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
Prof. Dr. Ir. RIZALDI BOER, Dr. JATNA SUPRIATNA, PhD, DIREKTUR EKSEKUTIF  
NASIONAL WALHI, DAN TIM NEGOSIATOR COP 22**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Dirjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Prof. Dr. Ir. Rizaldi Boer, Dr. Jatna Supriatna, PhD, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, dan Tim Negoisator COP 22
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 13 Oktober 2016
Waktu	: Pukul 15.00 WIB s.d 17.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 1
Ketua Rapat	: H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA (Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: ...Orang dari 48 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	: Dirjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Prof. Dr. Ir. Rizaldi Boer, Dr. Jatna Supriatna, PhD, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, dan Tim Negoisator COP 22
Acara	: Mendapatkan masukan terkait terkait pembahasan RUU tentang Pengesahan <i>Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

**CATATAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 dibuka pukul 16.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Komisi VII DPR RI dengan acara: Mendapatkan masukan terkait terkait pembahasan RUU tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

## II. CATATAN RAPAT

Komisi VII DPR RI telah mendengarkan pemaparan dari pakar Prof Dr. Ir Rizaldi Boer, Dr Jatna Supriatna, PhD, Direktur Eksekutif Nasional WALHI dan Tim Negosiator COP 22 sebagai masukan dalam menyetujui atau tidak menyetujui ratifikasi RUU tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Beberapa masukan dan pemaparan dari pakar, diantaranya sebagai berikut:

1. Jika Indonesia telah meratifikasi RUU tentang Pengesahan *Paris Agreement*, maka posisi Indonesia menjadi lebih strategis karena memiliki hak suara dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim.
2. *Paris Agreement* mendorong transparansi yang pada gilirannya akan membenahi keakuratan data-data pembangunan yang telah dilakukan oleh Indonesia.
3. Dengan meratifikasi menunjukkan *political will* pemerintah terhadap masyarakatnya mengingat dampak yang ditimbulkan oleh dampak perubahan iklim.
4. *Paris Agreement* berlaku mengikat bagi seluruh negara untuk mengurangi emisi penyebab perubahan iklim.
5. Pemerintah Indonesia secara sukarela menyampaikan komitmen-komitmen di dalam *Paris Agreement* yang akan berlaku pada tahun 2020, sehingga terkait dengan program 35.000 MW sudah diantisipasi oleh pemerintah.
6. Jika Indonesia mengalami kendala dalam melaksanakan komitmen-komitmen dalam *Paris Agreement*, maka ada ruang bagi Indonesia untuk menjelaskan mengapa komitmen-komitmen tersebut tidak dilaksanakan dan *Paris Agreement* tidak mengenal sanksi bagi negara jika belum melaksanakan komitmen tersebut.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.50 WIB

Jakarta, 13 Oktober 2016

**KETUA RAPAT,**



**H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak, MM, CA**